

**AKUNTABILITAS DANA RETRIBUSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
OPTIMALISASI KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

Dasmi Husin¹, Hamdani² Nurul³

dasmihusin@pnl.ac.id, hamdani@pnl.ac.id

^{1,2}Dosen Polteknik Negeri Lhokseumawe

³Alumni STIE Lhokseumawe

Abstract: *This study aims to look at the effect of retribution funds on budget management accountability at the North Aceh District Population and Civil Registration Office. A lot of legitimate income comes from community service from that office. The community does not feel heavy levying retribution fees if the service from the government office does not disappoint. But how then is the use of retribution funds. Of course ideally it must be managed correctly and responsibly according to the applicable financial procedures. This research has been carried out at the government office as listed above by taking a sample of 45 respondents. All populations were taken as samples. The research method uses descriptive methods. The statistical test tool is SPSS version 21 by means of simple regression of two different variables. The results of the study indicate that there is a significant effect of retribution on budget management accountability. The results of this test provide empirical evidence that the better the implementation of levies, the more increasing accountability for budget management in the North Aceh District Population and Civil Registration Office.*

Keywords: *Accountability, budget, fees, regions*

PENDAHULUAN

Era baru otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat telah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah.

Untuk menyelenggarakan konsep otonomi daerah yang luas di Indonesia diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan dari daerah sendiri. Daerah dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya dan sedikit demi sedikit mulai mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pusat. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Salah satu penerimaan daerah yang paling potensial adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian terpenting dari penerimaan daerah karena semakin tinggi sumber pendapatan asli daerah

maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membawa keyakinan yang pasti bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan mencari potensi yang ada sebagai sumber pendapatan daerah.

Untuk merealisasikan target pendapatan daerah yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar. Salah satunya adalah dana retribusi. Retribusi merupakan salah satu pendapatan yang strategis bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dana retribusi ini dikutip dari masyarakat karena masyarakat banyak menerima pelayanan jasa dari pemanfaatan fasilitas milik pemerintah. Oleh karena itu perlu mengumpulkan uang sebagai instrument pembiayaan. Uang yang dikumpulkan itu harus di upayakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kegagalan memenuhi realisasi penerimaan sesuai dengan target yang telah ditentukan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan pendapatan, target capaian sering dibuat lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Jika berhasil tercapai seolah-olah kelihatannya pemerintah telah berhasil mengelola retribusi. Capaian bisa

melampaui target tersebut instansi tersebut bisa dinyatakan berprestasi (Himawan Estu Bagijo, 2011).

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memiliki 63 (enam puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang 8 (delapan) di antaranya diberikan kewenangan dan bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengutipan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari kedelapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu SKPD yang jumlah retribusinya setiap tahun mengalami peningkatan.

Setiap tahunnya retribusi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara terus mengalami fluktuasi. Usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi yaitu dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam pengelolaan retribusi tentu perlu perhatian yang serius dan perlu adanya akuntabilitas yang baik demi terwujudnya *good governance* dan *clean governance*. Hal ini sesuai dengan penelitian Anies Iqbal Mustofa (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perombakan yang dilakukan pemerintah terhadap tatanan ekonomi.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran membawa hasil sebagai notasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu syarat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, instansi yang diberi kewenangan harus mampu menyediakan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada pihak terkait (Siti Aliyah, dkk, 2011).

Dengan adanya akuntabilitas yang baik maka ketimpangan-ketimpangan atau kecurangan terhadap dana retribusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dapat diminimalisir. Akan tetapi permasalahannya tetap ada yaitu terletak pada kesadaran sebahagian masyarakat terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti ID card. Selain itu banyaknya calo yang mengatasnamakan dari pemerintah mengutip secara tidak sah pada warga yang hendak mengurus ID card. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik dengan cara memperbaiki kinerja pegawai secara internal maupun upaya mencegah pihak-pihak

lain untuk melakukan pelanggaran. Kenyataannya kondisi sepereti ini seperti lumrah saja dan terus terjadi berulang-ulang. Hal inilah yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan retribusi dan hendaknya mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini telah dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel retribusi daerah terhadap akuntabilitas. Penggunaan dana retribusi daerah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara lebih baik lagi. Penegaruh ini sangat penting diketahui agar kantor pemerintahan tersebut bersungguh sungguh menerapkan akuntabilitas agar perolehan pendapatan restreibusinya meningkat dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Populasi target dalam penelitian ini adalah Pejabat Eselon II, III, IV dan seluruh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 45 orang. Mengingat populasi dalam penelitian ini kecil maka peneliti mengambil seluruhnya dari total populasi yang ada.

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan target sampel tersebut diatas. Responden juga diminta untuk menjawab kuisisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi linear sederhana. Adapun persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + bx + e$$

- Dimana : Y = Akuntabilitas pengelolaan anggaran
a = Nilai intercept (konstanta)
b = Koefisien regresi
x = Retribusi
e = *error term*

Kuesioner yang telah di isi oleh respondenditabulasikan dan diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) versi 21.

Peran Restribusi untuk Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata total skor tanggapan dari 45 responden, maka diketahui bahwa pelaksanaan retribusi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam kriteria Baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 38,5 berada pada interval “34,1 – 42” yang termasuk dalam kategori “Baik”. Artinya penerapan retribusi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara secara umum sudah baik. Untuk lebih jelasnya tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari jawaban responden berkaitan dengan indikator-indikator retribusi.

Mengenai besarnya kutipan retribusi telah sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi penggantian biaya ID Card dan akta catatan sipil, paling banyak responden sangat setuju disusul responden yang setuju. Mengenai peningkatan retribusi disebabkan oleh bertambahnya luas wilayah, paling banyak responden bersikap netral, namun banyak juga responden yang setuju.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata total skor tanggapan dari 45 responden, maka diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam kriteria Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 47,4 berada pada interval

“40,9 – 50,4” yang termasuk dalam kategori Tinggi. Artinya akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara secara umum sangat baik. Untuk lebih jelasnya tabel berikut ini menunjukkan distribusi hasil dari jawaban responden berkaitan dengan indikator-indikator akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Mengenai kegiatan/program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada dimasyarakat, paling banyak responden bersikap netral dan disusul dengan responden yang setuju. Demikian juga dengan langkah-langkah untuk mengedukasi masyarakat telah dilakukan dengan membangun komunikasi dengan baik. Mengenai perancangan target retribusi tiap tahun selalu mengacu pada visi dan misi, mayoritas responden setuju.

Analisis Pengaruh Restribusi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Analisis regresi linier merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval dan berdistribusi normal. Data hasil penyebaran kuesioner masih berupa skala ordinal maka sebelumnya dilakukan konversi data ordinal menjadi data interval dengan menggunakan program MSI (*Method of Successive Interval*). Bentuk model persamaan regresi yang akan di estimasi diformulasikan sebagai berikut :

Tabel 1. Koefisien Regresi dan Nilai t hitung

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,672	,292		2,298	,026
	Retribusi	,713	,108	,710	6,608	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Data diolah (2015)

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Hal ini dikarenakan semakin besar nilai *Beta* (0,713) berada di atas 0 (nol), maka semakin besar pula pengaruh retribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Hal ini sesuai dengan hipotesis statistik yaitu jika $\beta \neq 0$ maka variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data di atas dapat dibentuk model prediksi variabel retribusi

terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagai berikut :

$$Y = 0,672 + 0,713x + e$$

Berdasarkan persamaan prediksi di atas, maka dapat di interpretasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut :

- a. Koefisien retribusi sebesar 0,713 menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi sebesar 1.000,- (seribu rupiah) di prediksi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran sebesar 713 tingkat

pula. Itu berarti semakin baik pelaksanaan retribusi maka akuntabilitas pengelolaan anggaran akan meningkat, sebaliknya pelaksanaan retribusi yang kurang baik akan membuat akuntabilitas pengelolaan anggaran menurun.

- b. Nilai konstanta sebesar 0,672 menunjukkan nilai prediksi rata-rata akuntabilitas pengelolaan anggaran apabila retribusi tetap nol. Artinya jika variabel retribusi bernilai tetap maka akuntabilitas pengelolaan anggaran berada di atas standar.

Berdasarkan hasil pengolahan dapat dilihat nilai t_{hitung} dari variabel retribusi adalah sebesar 6,608 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas ($n-2$) = 43 adalah 2,017. Karena t_{hitung} (6,608) lebih besar dari t_{tabel} (2,017), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari retribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik pelaksanaan retribusi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.

Hipotesis yang menyatakan bahwa retribusi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah terbukti melalui pengujian hipotesis. Melalui uji- t dengan tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$), diputuskan untuk menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan retribusi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik pengelolaan retribusi daerah maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Variabel retribusi pada penelitian ini merupakan bagian dari pendapatan yang merupakan elemen dari target anggaran.

Hal ini konsisten dengan penelitian Himawan Estu Bagijo (2011) yang menunjukkan bahwa retribusi adalah potensi bagi penerimaan pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Anies Iqbal Mustofa (2012) yang menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan maka akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pada skala penafsiran skor rata-rata untuk variabel retribusi berada pada kategori baik yaitu sebesar 38,5 persen. Artinya retribusi yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara sudah baik, sedangkan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan anggaran berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 47,4 persen. Besarnya kutipan retribusi telah sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi penggantian biaya KTP dan akta catatan sipil, realisasi yang didapat juga selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Staf yang ditunjuk untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran retribusi yaitu bendahara penerimaan adalah staf yang mengerti tentang aturan dalam ekonomi. Pencatatan dana retribusi telah dilakukan dengan sistem informasi milik pemerintah yang disebut SIMDA keuangan. Dengan adanya sistem tersebut tingkat kesalahan dalam pelaporan keuangan sangat minim terjadi. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan dilakukan setiap bulan kepada pihak terkait. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tersebut setiap tahunnya di audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Meskipun demikian, penentuan target retribusi setiap tahunnya tidak dapat di prediksi secara realistis. Hal ini dikarenakan instansi terkait tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil khususnya akta kelahiran. Sampai saat ini instansi terkait belum pernah melakukan pendataan terhadap jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen tersebut. Untuk masyarakat yang telah memiliki dokumen kependudukan jumlah keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) yang ada pada server database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping itu dinas terkait juga tidak memiliki sumber daya yang mengerti terhadap prediksi target retribusi secara keuangan.

Pada dasarnya penerimaan retribusi sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Minoritas masyarakat hanya mengurus tepat pada saat dokumen itu dibutuhkan. Masyarakat lebih memilih menggunakan jasa calo dibanding mendatangi langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Dibutuhkan atau tidak saat ini, masyarakat harus

lebih aktif dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menyikapi hal ini pemerintah daerah juga harus terbuka dan memiliki mekanisme yang jelas terhadap pengelolaan retribusi dan pelayanan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran retribusi.

Dari hasil observasi penelitian, menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan asli daerah setiap tahunnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara disebabkan karena meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat mulai berpikir positif bahwa di masa sekarang dan dimasa yang akan datang seiring dengan perubahan negara yang semakin berkembang, dokumen itu akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh dana retribusi yang terkumpul menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 5% diantaranya diberikan untuk jasa pungut di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, selebihnya digunakan untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adanya regulasi pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang penghapusan retribusi terhadap semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menjadikan pemerintah dilematis dalam pencarian atau pengumpulan pajak daerah (PAD). Di satu sisi regulasi tersebut berdampak positif bagi masyarakat, tetapi di sisi lain akan menghilangkan pendapatan daerah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara perlu memikirkan alternatif/solusi yang dapat meningkatkan kembali pendapatan daerah.

Untuk memenuhi syarat akuntabilitas pengelolaan anggaran seperti yang di isyaratkan oleh Sulistoni (2003) 4 (empat) dari 5 (lima) point telah memenuhi dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Hanya point 5 (lima) yaitu adanya sarana bagi publik untuk dapat menilai kinerja pemerintah belum begitu memadai. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat sebenarnya dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Ini dapat dilihat dari tidak adanya media informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengakses target, realisasi anggaran dan laporan kinerja untuk satu periode tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh retribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan retribusi secara umum berada dalam kategori baik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran berada dalam kategori tinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran, semakin baik penerapan retribusi maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.
2. Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa retribusi memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 50,4% terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Retribusi memiliki pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran, dimana pelaksanaan retribusi yang baik akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto (2005), **Transparansi Pelayanan Publik**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anies Iqbal Mustofa (2012), **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**. (Online) Diakses tanggal 3 Februari 2014.
- Aristanti Widyaningsih (2012), **Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi (dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating)**. (Online) Diakses tanggal 3 Februari 2014.
- Eka Armas Pailis, dkk (2005), **Peranan Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru**. (Online) Diakses tanggal 3 Februari 2014.
- Himawan Estu Bagijo (2011), **Pengaruh Pajak**

dan Retribusi Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. (Online) Di akses tanggal 3 Februari 2014.

Mahmudi (2007), **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Edisi 2, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mawikere, dkk (2007), **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Pemerintah Kota Tomohon**, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.

Mardiasmo (2002), **Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta.

Marihot P. Siahaan (2005), **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siti Aliyah, dkk (2011), **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.** (Online) Diakses tanggal 3 Februari 2014.

Simanjuntak (2000), **Beberapa Alternatif Sumber Penerimaan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Pemerintah Daerah**. Makalah dalam Kongres Nasional ISEI, 21-23 April, Makassar.

Sugiyono (2011), **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung.